

## BAB 3

# Indo-Pasifik dalam Pusaran Geoekonomi: *De-Risking* dan Implikasinya bagi Indonesia

Arrizal Anugerah Jaknanihan & Alfin Febrian  
Basundoro

---

### A. Perkembangan Geoekonomi di Indo-Pasifik

Integrasi dan interdependensi ekonomi telah lama menjadi pilar yang menopang kerja sama di kawasan Asia-Pasifik. Lepas dari tensi geopolitik dengan Tiongkok di berbagai titik konflik,<sup>1</sup> negara-negara di kawasan tetap menjalin hubungan ekonomi yang erat selama dua dekade setelah berakhirnya Perang Dingin. Mengamati fenomena ini, para akademisi Hubungan Internasional, seperti David Kang (2003,

---

<sup>1</sup> Titik konflik atau *flashpoint* mengacu pada lokasi geografis yang menjadi kawasan rawan konflik. Brendan Taylor (2018) menjelaskan bahwa terdapat empat titik konflik yang membuat Indo-Pasifik menjadi kawasan rawan terhadap tensi geopolitik dibandingkan kawasan lain, di antaranya Laut Tiongkok Selatan, Semenanjung Korea, Selat Taiwan, dan Kepulauan Kenkaku.

---

A. A. Jaknanihan & A. F. Basundoro

The Habibie Center & Universitas Airlangga, *e-mail*: arrizal.jaknanihan@gmail.com

© 2026 Editor & Penulis

Jaknanihan, A. A. & Basundoro, A. F. (2026). Indo-Pasifik Dalam Pusaran Geoekonomi: De-Risking Dan Implikasinya Bagi Indonesia. Dalam RR. E. Yustiningrum & E. S. Prihatini (Ed.), *Indonesia dalam Kancan Geopolitik di Indo-Pasifik* (71–114). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.2075.c1720  
E-ISBN: 978-602-6303-98-1

2022), berargumen bahwa negara-negara Asia-Pasifik tidak melakukan pertimbangan atau *balancing* terhadap kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan besar.

Berbeda dari prediksi para akademisi neorealis, seperti John Mearsheimer (2005) dan Richard Betts (1993, 55), bahwa kebangkitan Tiongkok akan memicu ketidakstabilan di kawasan, Indonesia beserta negara-negara ASEAN secara aktif mendorong integrasi Tiongkok ke ekonomi dan institusi kawasan, menghasilkan kawasan yang tidak hanya berkembang pesat secara ekonomi, tetapi juga relatif stabil. Pada 1990, kontribusi Tiongkok terhadap perdagangan di kawasan melonjak dari 5% pada 1990 menjadi 27% pada 2019 (Kang, 2022, 85). Tidak hanya itu, persentase produk domestik bruto (PDB) terhadap anggaran militer negara-negara kawasan juga menurun drastis dari rata-rata 2,88% pada 1990 menjadi 1,6% pada 2021. Angka tersebut menggambarkan bergesernya prioritas kawasan Asia-Pasifik dari konflik militer ke kerja sama ekonomi bersama (Kang, 2022, 81–83).

Rampungnya negosiasi perjanjian dagang bebas (FTA) kawasan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) melalui kepemimpinan Indonesia dan ASEAN pada November 2020 turut memberikan pesan bahwa sekutu<sup>2</sup> Amerika Serikat (AS), seperti Australia, Korea Selatan, dan Jepang sekalipun tidak enggan bergabung ke dalam blok dagang beranggotakan rival geopolitik mereka, Tiongkok, demi kesejahteraan ekonomi bersama.

Optimisme David Kang patut diapresiasi. Namun, observasinya luput dalam memperhatikan dinamika ekonomi-keamanan yang muncul seiring dengan transformasi Asia-Pasifik menjadi Indo-Pasifik sebagai suatu kawasan strategis, yaitu munculnya tatanan geoekonomi atau *geoeconomic order* (Roberts et al., 2019). Di tengah tatanan geoekonomi, tendensi negara-negara untuk terjun dalam konflik tidak sepenuhnya hilang, tetapi metode konflik berubah dari

---

<sup>2</sup> Sekutu dalam konteks ini didefinisikan secara luas sebagai “*like-minded countries*” dengan *alignment* yang kuat, bukan aliansi dalam definisi sempit seperti sekutu formal (*treaty allies*). Untuk perbedaan definisi “sekutu,” di Asia-Pasifik, baca Wilkins (2012).

militer konvensional ke penggunaan instrumen ekonomi untuk tujuan strategis (Luttwak, 1990). Hubungan ekonomi yang secara tradisional menopang Asia-Pasifik akhirnya dipandang sebagai sumber konflik geopolitik di Indo-Pasifik.

Dalam pidatonya di *Brookings Institution*, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan (TWH, 2023) menegaskan bahwa, “Banyak dari kebijakan ekonomi internasional dalam beberapa dekade bergantung pada premis [yang salah] bahwa integrasi ekonomi membuat negara lebih bertanggung jawab dan terbuka, serta membuat tatanan global lebih damai dan kooperatif.” Nyatanya, lanjut Sullivan, “Integrasi ekonomi tidak menghentikan Tiongkok untuk memperluas ambisi militernya di kawasan, ataupun menghentikan Rusia menginvasi tetangga-tetangga demokrasinya, mengabaikan ketergantungan ekonomi yang telah dibangun selama beberapa dekade liberalisasi menjadi hal yang berbahaya.”

Pidato Sullivan mendeskripsikan pergeseran besar yang sedang terjadi pada tatanan ekonomi dan keamanan di Indo-Pasifik saat ini. Mulai dari perang tarif hingga perang teknologi antara Tiongkok dan sekutu AS, keterbukaan ekonomi tidak lagi dipandang sebagai prasyarat bagi kesejahteraan sebagaimana disebut dalam Konsensus Washington, tetapi sumber kerentanan di tengah ekonomi yang kian dipersenjатаi (Reinsch, 2023). Visi AS selaku jawara dari tatanan neoliberal telah berbelok 180 derajat dalam dua puluh tahun sejak Perang Dingin; dari mengintegrasikan Tiongkok ke dalam ekonomi dunia melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), ke menjauhkan Tiongkok dari pasar global melalui pengurangan risiko (*de-risking*). Sebagai dampak, tren geoekonomi di Indo-Pasifik akhirnya meruntuhkan tembok yang semula memisahkan kerja sama ekonomi dan keamanan, membuat keduanya sulit dibedakan (Gertz & Evers, 2020, 177).

Sebagai negara yang menggantungkan diri pada kerja sama ekonomi dengan berbagai mitra, munculnya tatanan geoekonomi memberikan tantangan besar bagi Indonesia. Kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia didasari pada strategi *hedging* (Anwar, 2023;

Priamarizki, 2024), yaitu meningkatkan otonomi dan meminimalisasi risiko dengan tidak mendekatkan diri hanya pada satu kekuatan besar. *Hedging* umumnya diterapkan oleh negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia, dengan mendorong kerja sama ekonomi yang erat dengan Tiongkok, tetapi tetap mempertahankan pengaruh keamanan AS di kawasan (Goh, 2007; Kuik, 2023). Strategi yang sama ditegaskan kembali oleh menteri pertahanan sekaligus presiden-terpilih Indonesia Prabowo Subianto (2024) dalam tajuknya yang berjudul “*The Road Ahead for Indonesia*,” “Sejalan dengan visi untuk posisi geopolitik negara kami [Indonesia], kami akan meneruskan kerja sama yang kuat dengan Tiongkok sebagai mitra ekonomi yang penting. Namun, pada saat yang sama, kami akan memperluas dan memperdalam kerja sama kami dengan AS.”

Namun, ketika berbagai negara semakin mengasosiasikan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok sebagai ancaman keamanan (Babić & Dixon, 2022; Chubb, 2023), apakah Indonesia masih dapat menerapkan strategi yang sama? Menanggapi tantangan geoekonomi di kawasan, bab buku bunga rampai berikut menganalisis tantangan dan peluang yang Indonesia hadapi dari tren *de-risking* di tengah munculnya tatanan geoekonomi Indo-Pasifik. Meski Indonesia memiliki posisi ideal sebagai negara yang netral, tren geoekonomi yang berlangsung berpotensi mempersempit ruang *hedging* dan manuver kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerapkan kebijakan ekonomi dan keamanan secara strategis (Lim, 2023).

Sebagaimana akan dibahas dalam bab buku ini, tingginya ketergantungan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok berpotensi membuat inisiatif Indonesia tidak disambut baik di tengah tatanan geoekonomi, di mana interdependensi ekonomi dengan lawan geopolitik semakin diasosiasikan sebagai ancaman keamanan (Farrell & Newman, 2019). Selain itu, rendahnya kapasitas industri (Anas et al., 2022, 259) dan minimnya kualitas dan konsistensi regulasi terkait bisnis (Indrawati et al., 2024, 29) juga membuat Indonesia sulit mengapitalisasi tren pengurangan ketergantungan yang ada secara optimal dibandingkan negara ASEAN lain, terutama Vietnam (Wijaya & Jayasuriya, 2024, 13).

Pada bagian selanjutnya, bab berikut akan menganalisis fenomena *de-risking* sebagai dampak dari munculnya tatanan geoekonomi di Indo-Pasifik. Bagian terkait *de-risking* akan mendiskusikan bagaimana tren geoekonomi membuat logika keamanan turut memengaruhi logika ekonomi dalam interaksi negara-negara di Indo-Pasifik. Kemudian, tulisan ini akan menjabarkan bagaimana implikasi dan respons Indonesia terhadap tren *de-risking* melalui berbagai ranah, terutama bilateral dan multilateral. Setelah membahas respons Indonesia, bab buku berikut akan membahas bagaimana limitasi dari upaya Indonesia dalam mengapitalisasi tren yang ada, baik berupa aneka permasalahan domestik maupun kapasitas luar negeri Indonesia, sebelum diakhiri dengan kesimpulan.

Metodologi dalam menganalisis respons Indonesia, menggunakan metode kualitatif berupa kajian literatur untuk sumber primer dan sekunder terkait kompetisi geoekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Data primer, di antaranya naskah pidato para pejabat terkait, kertas kebijakan, dan data statistik dari lembaga riset dan pemerintahan yang relevan; serta data sekunder, berupa buku, jurnal, makalah, artikel, dan karya terkait, dikumpulkan melalui sumber yang tersedia secara daring. Kajian pada data tersebut digunakan untuk analisis dalam tiga ranah besar, yaitu a) tren *de-risking* dan kompetisi geoekonomi di kawasan Indo-Pasifik, b) dampak tren terhadap Indonesia, serta c) respons kebijakan Indonesia.

## **B. *De-Risking* dalam Kacamata Geoekonomi**

### **1. Munculnya *Tren De-Risking***

Meski penggunaan ekonomi untuk kepentingan geostrategis bukanlah hal yang baru dalam politik internasional (Blackwill & Harris, 2016), geoekonomi merupakan tren yang masih relatif baru di kawasan Asia-Pasifik (Wesley, 2016, 4–5). Keterbukaan pasar dan ekonomi telah lama menjadi karakteristik yang melekat pada Asia-Pasifik sebagai suatu kawasan. Asia-Pasifik merupakan kawasan dengan jumlah Persetujuan Perdagangan Preferensial (PTA) terbanyak di dunia, dengan 333 PTA pada 2021 (UNESCAP, 2022). Indonesia

dan ASEAN berperan besar dalam mendorong keterbukaan ekonomi Asia-Pasifik melalui munculnya berbagai ASEAN + 1 FTA sepanjang tahun 2000-an dan RCEP pada 2020 yang beranggotakan seluruh negara ASEAN, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

Namun, eskalasi konflik antara AS dan Tiongkok, terutama sejak masa pemerintahan Trump membuat kacamata keamanan menjadi lebih dominan dalam membingkai kerja sama ekonomi yang telah ada di kawasan. Strategi *Pivot to Asia* pada era Obama yang mulanya bertumpu pada perdagangan bebas untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok kini digantikan dengan strategi yang bersifat proteksionis melalui restriksi dagang terhadap Beijing (Blackwill, 2024). Mulai dari perang dagang pada 2018, hingga pelarangan ekspor semikonduktor sejak 2019, kompetisi AS-Tiongkok kian mendorong Indo-Pasifik menuju ke tatanan geoeкономи. Krisis rantai pasok akibat pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina kian mengakselerasi transformasi ekonomi-keamanan di kawasan. Disrupsi yang terjadi menunjukkan bahwa ketergantungan yang berlebihan terhadap perdagangan bebas menciptakan celah untuk kerentanan terhadap disrupsi eksternal, terutama tensi geopolitik yang makin mencekam. Krisis yang Uni Eropa alami akibat pemutusan suplai gas dan minyak dari Rusia semakin memberikan contoh bahwa ketergantungan ekonomi dapat dipersenjatai suatu waktu ketika konflik geopolitik terjadi.<sup>3</sup> Janji Tiongkok untuk menjadi mitra “tanpa batas” Rusia turut menimbulkan ketakutan bahwa negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini akan turut mempersenjatai ekonominya (Nikoladze et al., 2023).

Tingginya kerentanan ekonomi terhadap tensi geopolitik akhirnya menciptakan tren baru yang disebut sebagai “*de-risking*”

---

<sup>3</sup> Farrell & Newman (2019) menjelaskan interdependensi yang dipersenjatai (*weaponized interdependence*) sebagai risiko globalisasi, yaitu ketika ketergantungan ekonomi yang tinggi pada suatu negara menciptakan struktur dengan insentif lebih bagi negara tersebut untuk menggunakan ketergantungan yang ada demi memaksa negara lain memenuhi kepentingan geopolitik. Kondisi kerap ditemui pada sektor yang cenderung dimonopoli segelintir negara, seperti telekomunikasi, perbankan, energi, dan sumber daya alam.

atau “pengurangan risiko” dari ketergantungan ekonomi berlebih pada negara yang dianggap berbahaya secara geopolitik (Cave, 2023). Meski secara praktis *de-risking* telah terjadi sejak perang tarif antara AS dan Tiongkok pada era Trump, istilah *de-risking* pertama kali diinstitusionalisasikan melalui pidato Presiden Uni Eropa Ursula von Der Leyen. Merespons tren persenjataan ekonomi oleh Tiongkok dan Rusia pascainvasi ke Ukraina, von Der Leyen (2023) menjelaskan bahwa *de-risking* merupakan strategi mengurangi ketergantungan pada sektor strategis demi meningkatkan resiliensi ekonomi dalam negeri serta mengurangi kerentanan terhadap konflik geopolitik dan persenjataan ekonomi. *De-risking* makin menjadi strategi kebijakan yang diprioritaskan di tengah dampak “overkapasitas” produksi Tiongkok, di mana Tiongkok membanjiri berbagai negara dengan produk manufaktur dengan harga terlampau murah dari industri yang disubsidi negara, terutama teknologi hijau, seperti kendaraan listrik (EV), panel surya, dan baterai (Taplin, 2024).

Istilah *de-risking* kemudian diadopsi secara lebih luas ke dalam kebijakan strategis setelah Konferensi Tingkat Tinggi G7 ke-49 di Kota Hiroshima, Jepang pada Mei 2023. Dalam dokumen Komunike Pemimpin G7 Hiroshima (TWH, 2023), pemimpin-pemimpin dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS menggarisbawahi bahwa negara G7 perlu “mengakui bahwa [untuk mencapai] ketahanan ekonomi, dibutuhkan kebijakan *de-risking* dan diversifikasi” dengan “mengurangi ketergantungan yang berlebih pada rantai pasok kritis”. Dua hal patut digarisbawahi dari Komunike G7. Pertama, berbeda dari strategi “*decoupling*” ala Perang Dingin yang berusaha melepaskan seluruh ikatan ekonomi, *de-risking* berfokus pada sektor-sektor kritis, seperti teknologi dan mineral. Kedua, *de-risking* didorong tidak hanya melalui logika ekonomi, tetapi juga geopolitik untuk mengurangi pengaruh Tiongkok dan potensi penggunaan ekonomi untuk instrumen keamanan.

Sebagai negara di kawasan yang menjadi partner dagang nomor satu Tiongkok,<sup>4</sup> Indonesia dan ASEAN mendapatkan imbas dari tren

---

<sup>4</sup> Tiongkok menjadi partner dagang terbesar ASEAN sejak 2009 dan ASEAN

*de-risking*, Indonesia mulanya menyambut *de-risking* secara optimis. Presiden Indonesia Joko Widodo menyebutkan bahwa perang dagang yang menjadi bagian dari *de-risking* merupakan “peluang” yang perlu dimanfaatkan (SKRI, 2019). Indonesia berpotensi untuk mendapatkan keuntungan besar sebagai lokasi pasar dan produksi alternatif ketika Tiongkok dan sekutu-sekutu AS saling berlomba mencari mitra lain untuk berdagang. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan peluang yang ada jauh dari kata optimal.

Lepas dari peluang dari *de-risking*, tingkat partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global (GVC), produktivitas dari sektor manufaktur, dan penyerapan investasi asing masih kalah dibandingkan tetangga-tetangga di kawasan, seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Singapura (Patunru, 2023). Selain itu, sekuritisasi terhadap kerja sama ekonomi yang berlangsung di tengah tren ini juga membatasi ruang manuver politik luar negeri Indonesia. Kondisi ini diakibatkan karena kerja sama ekonomi yang secara tradisional digunakan sebagai instrumen *hedging* semakin diasosiasikan dengan kedekatan atau *alignment* politik terhadap salah satu kekuatan besar (Lim, 2023).

## 2. *De-Risking* dan Sekuritisasi Ekonomi

*De-risking* muncul seiring dengan transformasi Asia-Pasifik menjadi Indo-Pasifik sebagai kawasan geostrategis. Berbeda dengan kawasan “Asia-Pasifik” yang identik dengan kerja sama ekonomi dan pasar bebas<sup>5</sup>, konsep “Indo-Pasifik” lahir dari kompetisi geopolitik. Sebagaimana diungkapkan oleh Amitav Acharya (2024), Konsep ‘Asia’ dibangun oleh para nasionalis, ‘Asia-Pasifik’ oleh para ekonom, ‘Asia Timur’ oleh para budayawan, dan ‘Indo-Pasifik’ oleh para ahli strate-

---

menjadi partner dagang nomor satu Tiongkok pada 2020, menyaingi volume dagang Tiongkok dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang (Wester, 2023). Tiongkok juga menjadi partner dagang terbesar Indonesia dengan volume dagang 127,815 juta dan surplus 2,053 juta dolar AS pada 2023 (KPRI, 2024).

<sup>5</sup> Asia-Pasifik sebagai suatu konsep kawasan dibangun oleh institusi yang mengedepankan keterbukaan pasar dan integrasi ekonomi di kawasan, seperti APEC dan forum-forum ASEAN. Untuk analisis terkait transformasi kawasan Asia-Pasifik menjadi Indo-Pasifik, baca Heiduk et al. (2020) dan Medcalf (2020).

gi.” Institusionalisasi Indo-Pasifik sebagai suatu konsep geostrategis membuat batas antara ekonomi dan keamanan nasional semakin kabur.

Dalam peluncuran Strategi Keamanan Nasional AS, contohnya, mantan Presiden Donald Trump (TWH, 2017) menegaskan bahwa “keamanan ekonomi merupakan keamanan nasional.” Hengkangnya Trump dari Gedung Putih setelah pemilu AS tahun 2020 tidak mengubah haluan kebijakan AS dalam memandang ekonomi di Indo-Pasifik melalui kacamata keamanan. Mengacu pada koersi ekonomi yang dilakukan Tiongkok, Joe Biden menekankan ancaman “dari pemerintah otokratik yang kerap menyalahgunakan tatanan ekonomi global dengan mempersenjatai konektivitas [ekonomi]” sebagai basis dalam Strategi Keamanan Nasional AS tahun 2022 (TWH, 2022, 21).

Kerja sama ekonomi akhirnya tidak lagi dipandang cuma-cuma sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi bersama bagi negara yang terlibat dalam kompetisi, tetapi sebagai celah yang membuat negara rentan terhadap disrupsi ekonomi. Menurut *laporan Mercator Institute for China Studies (MERICS)*, Beijing telah menerapkan 39 sanksi ekonomi sepanjang 2012–2023 (Ghiretti, 2023). Beberapa contoh persenjataan ekonomi seperti sanksi Tiongkok terhadap Korea Selatan dalam kasus *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)* tahun 2017 dan Australia pada kasus investigasi pandemi COVID-19 tahun 2021 semakin memberikan preseden bahwa negara perlu segera mengamankan ekonominya.<sup>6</sup> Sejalan dengan tren ini, AS selaku ekonomi terbesar di dunia juga menjadi negara yang menerapkan kebijakan restriksi dagang dengan jumlah tertinggi. Sejak 2022–2023, AS telah menerapkan lebih dari 4.200 intervensi yang restriktif terhadap perdagangan (GTA, 2024).

---

<sup>6</sup> Laporan *Center for Strategic and International Studies (CSIS)* oleh Reynolds & Goodman (2023, 12) memaparkan bahwa Tiongkok cenderung akan mempersenjatai ekonominya apabila ada isu yang mengancam legitimasi domestik dan keamanan nasional dengan target rawan yaitu negara dengan relasi ekonomi yang asimetrik.

Meski *de-risking* dan *decoupling* sama-sama bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dari negara lawan, keduanya mengambil pendekatan yang berbeda. *Decoupling* dilakukan ketika interdependensi ekonomi antara AS dan Uni Soviet masih relatif rendah. Namun, munculnya Tiongkok sebagai kekuatan besar membawa tantangan yang berbeda. Rata-rata porsi perdagangan antara AS dengan Soviet selama 1970–1980-an hanya sebesar 1% (Becker, 1987). Sebaliknya, Tiongkok merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia dan menjadi mitra perdagangan nomor satu AS dengan kontribusi ekspor dan impor sebesar 7,5% dan 16,5% terhadap AS (Oustr, 2024). Kondisi ini memunculkan konsep *de-risking* sebagai “jalan tengah” yang lebih realistis untuk meningkatkan resiliensi ekonomi, tetapi turut menghindari besarnya biaya *decoupling* total dari Tiongkok.

Berbeda dari *decoupling* yang bertujuan untuk melepas seluruh kerja sama ekonomi, *de-risking* lebih berfokus pada sektor-sektor strategis yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan (TWH, 2023) secara spesifik menyebut strategi ini sebagai pendekatan “halaman yang kecil dan pagar yang tinggi”. “Pagar tinggi” dalam hal ini mengacu pada penerapan kebijakan proteksionis yang ketat, tetapi diterapkan secara terfokus pada “halaman yang kecil,” yaitu sektor-sektor strategis seperti teknologi dan mineral kritis.

Salah satu contoh kebijakan *de-risking* adalah keputusan AS dan sekutunya untuk mengurangi ketergantungan dan memutus akses Tiongkok terhadap teknologi semikonduktor yang berpotensi memiliki penggunaan ganda (*dual use*) untuk memperkuat kapabilitas defensif maupun ofensif militer Tiongkok. Pada Oktober 2022, Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS menerapkan larangan ekspor besar-besaran terhadap semikonduktor yang memiliki komponen dari AS. Melalui *CHIPS and Science Act* pada Agustus 2022, AS juga menggelontorkan US\$52.7 miliar untuk mendorong pengembangan riset dan manufaktur produk semikonduktor (TWH, 2022). AS mengeskalasi kebijakan proteksionismenya melalui *Inflation*

*Reduction Act* (IRA) pada bulan yang sama untuk memberikan kredit pajak dan insentif bagi perusahaan dalam negeri untuk memproduksi teknologi ramah lingkungan—sekaligus mengurangi daya saing produk-produk Tiongkok di pasar AS.

### 3. *De-Risking* sebagai Instrumen Geoekonomi

Terdapat berbagai pendekatan dalam memandang munculnya tren kompetisi geoekonomi di Indo-Pasifik. Wijaya & Jayasurya (2024), misalkan, memandang bahwa konflik geopolitik menciptakan “neoliberalisme yang dipersenjata,” tetapi tetap mempertahankan karakteristik umum neoliberalisme seperti akumulasi dan mobilisasi kapital. Senada, Jayant Menon (2024, March 23) juga berargumen bahwa pertumbuhan berorientasi ekspor (*export-led growth*) yang menjadi karakteristik neoliberalisme Asia Timur tidak menghilang, tetapi menyesuaikan diri terhadap batasan yang muncul akibat kompetisi geopolitik. Tanpa mengesampingkan pendekatan neoliberal terhadap fenomena geoekonomi. Tulisan berikut lebih memandang *de-risking* melalui perspektif geoekonomi, yaitu penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan strategis.

Melalui pendekatan neorealis, geoekonomi pertama kali didefinisikan oleh ahli strategi Edward Luttwak (1990, 19) sebagai “perpaduan antara logika konflik dengan metode perniagaan” atau “logika konflik dengan tata bahasa komersial.” Melalui pendekatan Luwakian et al. (2016, 9) dalam bukunya *War by Other Means* secara lebih spesifik mendefinisikan geoekonomi sebagai penggunaan instrumen ekonomi untuk mendorong dan mempertahankan kepentingan nasional, juga upaya menciptakan tatanan geopolitik yang kondusif untuk kepentingan ekonomi.

Melalui pendekatan geoekonomi, *de-risking* dapat dipandang sebagai instrumen untuk memitigasi ancaman dari lawan geopolitik terhadap ekonomi. Dalam karyanya *Weaponized Interdependence*, Farrell & Newman (2019) menganalisis bagaimana globalisasi menciptakan ketergantungan ekonomi yang tidak seimbang antara berbagai negara, di mana beberapa negara lebih bergantung terhadap

negara dengan ekonomi yang dominan dibandingkan negara lainnya. Negara dengan tingkat interdependensi yang lebih tinggi terhadap negara lain akhirnya menjadi lebih rawan terhadap potensi persenjataan ekonomi (*economic weaponization*) dari negara lawan. Begitu pula sebaliknya, negara dengan kekuatan ekonomi yang lebih dominan memiliki insentif dan keleluasaan yang lebih besar untuk menggunakan pengaruh ekonominya demi kepentingan geostrategis.

Farrell & Newman (2019, 65–70) mengilustrasikan persenjataan ekonomi menggunakan kasus *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications* (SWIFT). Ketergantungan negara-negara di dunia terhadap sistem telekomunikasi perbankan SWIFT membuat AS yang memegang yurisdiksi atas SWIFT dapat menggunakannya untuk keperluan keamanan dan geostrategis, seperti memutus layanan bank-bank Rusia setelah invasinya ke Ukraina pada 2021 silam.

Dalam konteks Indo-Pasifik, contoh lain penggunaan instrumen geoekonomi adalah proyek pendanaan infrastruktur Inisiatif Sabuk dan Jalan (*Belt and Road Initiative/BRI*) oleh yang berjalan seiringan dengan perluasan pengaruh geopolitik Tiongkok di negara-negara penerima, terutama negara-negara berkembang di *Global South* (Li, 2020). Studi Dreher et al. (2022) menemukan bahwa negara resipien BRI dan dana pembangunan Tiongkok memiliki kecenderungan lebih besar untuk tidak menunjukkan rekognisi terhadap Taiwan dan mendukung posisi Tiongkok dalam forum-forum internasional.

*De-risking* muncul sebagai upaya meminimalisasi dampak kompetisi geopolitik dan geoekonomi terhadap negara, terutama dalam sektor kritis yang marak dipersenjatai. Dalam sektor mineral, sebagai contoh, Tiongkok mendominasi hampir 60% produksi dan 90% pemrosesan mineral kritis dunia yang digunakan untuk berbagai teknologi (IEA, 2023). Hal ini secara efektif membuat Tiongkok memiliki dominasi atas manufaktur teknologi elektronik dan hijau, seperti EV yang membutuhkan mineral kritis sebagai komponen utama baterai. Kondisi ini mendorong AS dan sekutunya untuk meluncurkan koalisi Kerja Sama Keamanan Mineral bersama 13 negara lain pada 2022 dengan fokus untuk mengurangi ketergantungan dari

Tiongkok dan membuat alur rantai pasok alternatif di antara negara sahabat, termasuk Indonesia (Nangoy, 2024). Sebagai negara yang memproduksi kurang lebih setengah dari nikel dunia, tren *de-risking* dan geoekonomi dapat memengaruhi Indonesia.

### C. Transformasi Institusi di Kawasan dan Dampaknya bagi Indonesia

Kompetisi geoekonomi mendorong transformasi institusi ekonomi dan keamanan di Indo-Pasifik. Peranan institusi ekonomi kini turut diperluas untuk mengatasi isu-isu terkait keamanan. Sebaliknya, transformasi geoekonomi juga membuat institusi keamanan turut mencakup isu terkait ekonomi (Roberts et al., 2019; Wesley, 2016, 4; Wijaya & Jayasuriya, 2024, 2). Beberapa institusi ekonomi negara Indo-Pasifik, seperti Badan Peninjau Penanaman Modal Asing (FIRB) Australia, Departemen Perdagangan AS, dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang, misalnya, kini memperluas fungsinya untuk turut mengatur area keamanan ekonomi. Sebaliknya, institusi keamanan kawasan, seperti NATO, Quad, dan AUKUS turut mendorong kerja sama keamanan ekonomi yang semakin dipandang tak terpisahkan dari dimensi geopolitik.

Transformasi yang serupa juga ditunjukkan dengan semakin maraknya inkorporasi kebijakan ekonomi dalam strategi keamanan nasional setelah perang di Ukraina. Beberapa di antaranya adalah *Economic Security Strategy* yang diterbitkan Komisi Eropa pada 2023, *The Economic Security Promotion Act* oleh Jepang pada 2022, dan baru-baru ini seperti kebijakan keamanan ekonomi dalam *National Interest Framework* Australia pada 2024. Transformasi tersebut memberikan berbagai implikasi terhadap Indonesia sebagai negara yang berada dalam posisi tengah dalam pusaran geoekonomi yang berlangsung.

## 1. Ruang Manuver Bebas-Aktif yang Menyempit

Proses sekuritisasi terhadap inisiatif ekonomi mempersempit ruang manuver Indonesia sebagai “kekuatan menengah”<sup>7</sup> di Indo-Pasifik. Kebijakan bebas-aktif Indonesia diterapkan melalui strategi *hedging* dan *omni-enmeshment*,<sup>8</sup> (Goh, 2007) di mana Indonesia berusaha menjaga otonominya melalui hubungan ekonomi yang kuat dengan seluruh pihak, terutama Tiongkok, tetapi tetap mempertahankan relasi strategisnya dalam sektor keamanan dengan negara lain, terutama AS, demi mencegah munculnya satu kekuatan besar yang terlalu dominan di kawasan.

Secara tradisional, strategi tersebut dapat dilakukan karena hubungan ekonomi dapat berlangsung tanpa mencederai kerja sama keamanan yang telah dibangun. Suatu negara dapat menjalin hubungan ekonomi yang erat meskipun memiliki tensi geopolitik dengan partner dagang (Lim & Cooper, 2015, 70). Namun, di tengah batas yang semakin kabur antara kerja sama ekonomi dan keamanan, aplikasi *hedging* melalui instrumen ekonomi berpotensi disalahartikan sebagai kedekatan keamanan Indonesia dengan salah satu pihak (Lim, 2023).

Dalam upaya merespons upaya *de-risking* AS pada komoditas mineral kritis, misalnya, Indonesia di bawah arahan Menteri Koordinator urusan Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan

---

<sup>7</sup> Kekuatan menengah atau *middle powers* merupakan kategori negara yang secara kekuatan tidak sebesar para kekuatan besar atau *great powers* dan *major powers*, tetapi memiliki peran kuat dalam memengaruhi dinamika kawasan dengan perannya sebagai pendukung multilateralisme, fasilitator dialog, dan mengambil posisi tengah di antara konflik geopolitik yang berlangsung. Untuk kebijakan luar negeri Indonesia sebagai kekuatan menengah, lihat lebih lanjut pada Karim (2018), Ardhani et al. (2023), dan Umar (2023).

<sup>8</sup> *Omni-enmeshment* merupakan strategi kebijakan luar negeri yang umumnya digunakan negara-negara ASEAN untuk mencegah suatu kekuatan besar menjadi terlalu dominan di kawasan dengan cara membuat institusi kawasan yang inklusif sehingga seluruh kekuatan eksternal dapat saling terlibat, secara efektif mencegah pengaruh hanya dari satu negara. Untuk strategi *omni-enmeshment*, lihat lebih lanjut pada (Goh, 2007).

berusaha untuk menegosiasikan FTA terbatas dengan AS (Ghifari, 2023). Langkah ini Indonesia tempuh untuk mengamankan subsidi dan kredit pajak dari kebijakan IRA yang mengharuskan komponen teknologi, salah satunya nikel, diproduksi dari negara yang memiliki FTA dengan AS. Sebelumnya, Jepang telah sukses menerapkan langkah serupa dengan menandatangani FTA terbatas untuk mineral kritis pada bulan Maret 2023. Namun, upaya Indonesia hingga kini belum membuahkan hasil. Selain karena kekhawatiran terkait efektivitas regulasi dan lingkungan, dominasi Tiongkok dalam rantai pasok mineral Indonesia turut menjadi perhatian.

Pada bulan Oktober 2023, sekelompok senator AS mengirimkan surat penolakan terhadap Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo terkait potensi FTA terbatas dengan Indonesia karena alasan dominasi Tiongkok di sektor mineral Indonesia (Yuniar, 2024). Menurut Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), 90% dari investasi asing untuk smelter Indonesia berasal dari Tiongkok (Raharjo et al., 2023). Minimnya diversifikasi Indonesia dari Tiongkok berpotensi membuat AS menerapkan klausul *“foreign entity of concern”* atau kebijakan tarif lain yang mencegah investasi dan ekspor dari perusahaan Indonesia yang berhubungan erat dengan entitas-entitas Tiongkok tertentu (Yuniar, 2024).

Kondisi ini turut diperburuk kewaspadaan AS terhadap strategi Tiongkok dalam menghindari tarif AS dengan mengeksport produknya ke negara-negara perantara di Asia Tenggara terlebih dahulu sebelum diekspor ke pasar AS (Wiwardja, 2024). Preseden dari kasus serupa telah terjadi, yaitu ketika Departemen Perdagangan AS memberikan sanksi ekonomi pada lima perusahaan manufaktur panel surya di Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang menjadi perantara perusahaan Tiongkok demi menghindari tarif AS (Lee & Kaufman, 2023). Kasus serupa dapat terjadi pada sektor di mana Tiongkok memiliki pengaruh dominan di Indonesia.

## **2. Minimnya Inisiatif Ekonomi di Kawasan**

Tingginya tingkat ketergantungan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok sepatutnya dapat ditangani dengan kebijakan diversifikasi yang

lebih menyeluruh. Namun, hal tersebut kurang dapat dimaksimalkan karena sedikitnya opsi kerja sama ekonomi alternatif yang ada dari AS selaku partner dagang terbesar kedua di kawasan.<sup>9</sup> Tren geoekonomi di kawasan mendorong sensitivitas AS terhadap FTA dan pasar bebas.

Hampir satu dekade setelah AS hengkang dari FTA kawasan yang ia inisiasi sendiri pada masa pemerintahan Barack Obama, Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) pada 2017, AS tidak menunjukkan tanda untuk bergabung ke dalam FTA apapun di Indo-Pasifik di mana Indonesia dapat berpartisipasi. Sejak pemilu AS pada 2016, terdapat sentimen domestik yang dirasakan, baik oleh kubu Partai Demokrat maupun Partai Republik bahwa kebijakan perdagangan bebas yang selama ini AS topang memberikan berbagai kerugian, mulai dari tingginya defisit neraca dagang negara, hilangnya pekerjaan, dan kalahnya industri dalam negeri dari kompetisi barang asing (Schoenbaum, 2023). Sentimen terhadap pasar bebas tidak hanya AS tujukan pada TPP, tetapi juga FTA lain di Asia-Pasifik dan secara global dengan boikot terhadap Badan Banding WTO dan negosiasi ulang perjanjian dagang USMCA.

Henggangnya Trump dan terpilihnya Biden sebagai presiden pada 2020 tidak serta merta membuat sentimen AS terhadap FTA berkurang. Lepas dari tensi yang semakin meningkat dengan Tiongkok, AS tidak menawarkan inisiatif ekonomi yang cukup berarti bagi Indonesia dan negara-negara kawasan lain untuk mendorong upaya *de-risking*. Sejauh ini, tidak ada intensi bahwa AS akan bergabung ke dalam TPP yang bertransformasi menjadi Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) di bawah inisiasi Jepang ataupun mega-FTA RCEP yang didorong oleh ASEAN.

Alih-alih mendorong inisiatif ekonomi yang membukakan akses pasar bagi Indonesia, Biden mendorong Kerangka Kerja Sama Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) sebagai alternatif kebijakan geoekonomi pada Mei

---

<sup>9</sup> AS merupakan partner dagang terbesar nomor kedua ASEAN setelah Tiongkok dengan kontribusi sebesar 10,9% dari total perdagangan ASEAN. AS juga merupakan kontributor investasi terbesar di ASEAN (ASEAN, 2023b).

2022. IPEF bertumpu pada empat pilar, yaitu pilar perdagangan, pilar rantai pasok, pilar ekonomi hijau, dan pilar ekonomi bersih dengan tujuan menciptakan norma bersama dan platform kerja sama untuk mengurangi ketergantungan dari Tiongkok dan rantai pasok yang lebih tangguh. Meski demikian, IPEF tidak menawarkan adanya akses yang lebih besar untuk pasar AS—hal yang paling dibutuhkan oleh negara-negara kawasan. Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo menegaskan dalam pertemuan APEC di San Fransisco pada 2023 bahwa “IPEF perlu dipahami bukan sebagai suatu perjanjian dagang” (Seow, 2023).

Munculnya IPEF menggambarkan tren geoekonomi kawasan, di mana kerja sama ekonomi lebih digunakan sebagai instrumen politik ketimbang ekonomi murni (Wilson, 2012). Kondisi ini tidak hanya memengaruhi posisi sentral Indonesia sebagai pemimpin di kawasan, tetapi juga target pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang sangat bergantung pada kerja sama dengan negara lain. Sektor teknologi dan mineral yang menjadi target *de-risking* merupakan salah satu sektor prioritas yang Indonesia berusaha kembangkan dalam upaya mencapai status negara maju berpendapatan tinggi (BAPPENAS, 2023, 88–89). Indonesia menerapkan beberapa pendekatan di ranah domestik bilateral, dan internasional dalam menghadapi tantangan *de-risking* ini—meski limitasi yang Indonesia hadapi tidak kalah besar.

#### D. Respons Indonesia terhadap Tren *De-risking*

Dalam menghadapi tren *de-risking* di Indo-Pasifik, Indonesia sejak era kepresidenan Joko Widodo berupaya untuk melakukan aneka respons untuk memperoleh keuntungan dari tren tersebut, terutama melalui kanal bilateral dan multilateral. Seiring dengan meningkatnya tren *de-risking* di kawasan Indo-Pasifik dalam lima tahun terakhir, Indonesia melakukan variasi pendekatan yang lebih luas. Sekali-pun pada periode pertama kepresidenan Joko Widodo Indonesia cenderung hanya memperkuat relasi dengan Tiongkok pada sektor pertambangan mineral kritis, khususnya dengan terlaksananya Kemitraan Strategis Komprehensif antara kedua negara (Tritto, 2023, 6),

kemitraan yang lebih variatif dalam sektor ini dilaksanakan Indonesia pada pemerintahan Joko Widodo yang kedua.

Pendekatan bilateral dilaksanakan Indonesia dengan cara diversifikasi kemitraan pada sektor pertambangan dan teknologi dengan negara-negara Barat dan kekuatan menengah global. Misalnya, Indonesia meningkatkan level kerja sama dengan AS menjadi strategis-komprehensif pada tahun 2023 dan mendorong kerja sama yang lebih erat dengan Australia dalam lima tahun terakhir (Zhang, 2023). Secara multilateral, pendekatan Indonesia dalam hal ini mencakup aktivitas dalam forum-forum multilateral, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, seperti OECD. Sekalipun Tiongkok masih berperan penting dalam pengembangan sektor ini di Indonesia, Indonesia berupaya mengapitalisasi tren *de-risking* mineral kritis di kawasan dengan mendorong keterlibatan aktor strategis yang lebih luas dan bervariasi.

## 1. Pendekatan Bilateral

Secara bilateral, upaya Indonesia untuk memanfaatkan *de-risking* berfokus pada pendekatan terhadap negara-negara mitra strategis untuk mendiversifikasi opsi Indonesia di tengah pusaran konflik geoekonomi. Dalam dekade terakhir, Indonesia cenderung dekat kepada Tiongkok untuk urusan ekonomi, bahkan Presiden Tiongkok, Xi Jinping meresmikan kerja sama BRI di Jakarta pada bulan Oktober 2013 (Garlick, 2023, 75). Dalam kesempatan tersebut, Xi menyatakan bahwa proyek BRI menjadi upaya Tiongkok untuk mendorong kerja sama dengan Asia Tenggara. Inisiatif ini kian memperkuat kerja sama Indonesia-Tiongkok yang telah berstatus kemitraan strategis komprehensif dengan Beijing sejak tahun 2013 (Anwar, 2019, 4). Pendekatan ini terus berlanjut pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo, di mana pada tahun 2021, perwakilan kedua negara menyepakati dibentuknya sekretariat dialog tingkat tinggi dan kerja sama yang memfasilitasi kerja sama bilateral (Wenbin, 2021).

Lebih lanjut, proyek BRI Indonesia–Tiongkok memiliki cakupan yang sangat luas, di mana proyek tersebut disinergikan dengan visi

Poros Maritim Global (*Global Maritime Fulcrum/BRI*) dan menjadi kesatuan kerja sama GMF-BRI (Jiang, 2023, 3–4; KLNRI, 2022). Dengan aneka status di atas, kedua negara telah mengembangkan kerja sama dalam berbagai bidang, mulai dari pembangunan infrastruktur strategis, kawasan industri, kelautan dan perikanan (Damuri et al., 2014, 12), hingga perdagangan (Damuri et al., 2014, 10–11; Jiang, 2023). Hingga tahun 2023, Tiongkok masih menjadi negara investor terbesar kedua di Indonesia—setelah Singapura, tetapi memegang peranan yang paling sentral dalam pembangunan infrastruktur dan sektor padat-kapital, seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Prasetyo, 2023, 13) dan proyek hilirisasi mineral, khususnya nikel, yang belakangan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia (Jennings, 2024; Tritto, 2023, 1). Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi Tiongkok di Indonesia mencapai US\$ 7,3 miliar pada tahun 2023.

Akan tetapi, rivalitas antara Tiongkok dan AS terus berlanjut, di mana kedua negara memanfaatkan ekonomi sebagai instrumen keamanan. Tren *de-risking* kian gencar dilakukan oleh AS dan sekutunya di Asia Timur maka diversifikasi kemitraan bilateral dengan memperkuat relasi dengan AS dan sekutunya menjadi respons bilateral utama Indonesia dalam memanfaatkan tren konfliktual tersebut. Di antaranya, Indonesia mendorong peningkatan kualitas kerja sama hingga level strategis-komprehensif (*Comprehensive Strategic Partnership*) dengan AS yang disepakati pada bulan November 2023. Dalam pernyataan bersama antara Presiden Joko Widodo dan Joe Biden, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama rantai suplai mineral kritis, industri teknologi informasi, khususnya semikonduktor, dan teknologi energi terbarukan (TWH, 2023). Lebih lanjut, AS juga mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam industri semikonduktor untuk mendorong keterlibatan Indonesia dalam rantai suplai global (TWH, 2023, 4–5; USDS, 2023, 4–5). Sekalipun memang status kerja sama strategis-komprehensif tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan, upaya ini perlu diapresiasi, mengingat dengan status tersebut, Indonesia akan

memperoleh keuntungan signifikan dalam pengembangan sektor mineral dan teknologi yang menjadi tulang punggung ekonomi di masa mendatang.

Selain dengan AS, Indonesia juga memperkuat relasi dengan Australia. Selain untuk menyambut keuntungan dari *de-risking* Australia terhadap Tiongkok, Indonesia memanfaatkan penguatan relasi ini guna memperluas ruang geraknya dalam menghadapi risiko geoekonomi regional. Berdasarkan analisis Lian Sinclair dan Neil Coe dari Sydney Southeast Asia Centre (2024), sekalipun belum berstatus strategis-komprehensif, perwakilan Jakarta dan Canberra dalam tiga tahun terakhir terus mengintensifkan pembicaraan kerja sama sektor mineral dan teknologi, yang menunjukkan peningkatan signifikan relasi kedua negara pada era Presiden Joko Widodo, yang sejalan dengan visi hilirisasi mineral yang menjadi prioritasnya (DIS, 2023). Hingga tahun 2023, keduanya telah delapan kali mengadakan pertemuan 2 + 2 yang tidak hanya membahas soal kerja sama politik dan pertahanan, melainkan juga menyinggung percepatan perdagangan dan investasi dua arah (DFAT, 2020, 2021). Lebih lanjut, dalam *Plan of Action for the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership 2020–2024*, disebutkan bahwa kedua pihak sepakat untuk mengembangkan arsitektur perdagangan bebas dan investasi dalam kerangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) dan *Economic, Trade, and Investment Minister Meeting*, yang memudahkan investasi Australia di Indonesia. Selain itu, beban tarif yang jauh berkurang akan mendorong keuntungan bagi Perusahaan Australia dalam berinvestasi di sektor mineral, mengingat minimnya biaya yang harus ditanggung (DFAT, 2020). Lebih lanjut, sebagaimana AS, Australia juga menyetujui kerja sama pengembangan SDM bidang teknologi, yang akan menguntungkan Indonesia seiring dengan peningkatan kualitas SDM secara intensif.

Secara spesifik, Australia pula meningkatkan investasi riil pada sektor pertambangan mineral di Indonesia. Nickel Industries, salah satu perusahaan tambang terkemuka Australia, mulai berinvestasi di Indonesia sejak tahun 2012 di Morowali, Sulawesi Tengah (NI,

2024). Selain melakukan ekstraksi, Nickel Industries juga melakukan hilirisasi dalam bentuk konversi dari feronikel NPI yang bernilai rendah menjadi *nickel matte* yang bernilai lebih tinggi (NI, 2024; Thompson, 2024). Secara keseluruhan, perusahaan tersebut telah memproduksi lebih dari 13,4 juta ton nikel dengan pendapatan mencapai US\$ 87,9 juta pada tahun 2023 (NI, 2024). Aneka kapasitas dan pencapaian tersebut membuat Nickel Industries tidak hanya menjadi mitra strategis Indonesia dalam mengambil peran di tengah tren *de-risking*, tetapi juga berperan dalam meningkatkan pendapatan Indonesia dalam sektor ekstraksi mineral (Hunt et al., 2024). Dengan capaian korporasinya, Australia tidak hanya melakukan penambangan mineral di Indonesia, tetapi juga terlibat dalam hilirisasi mineral. Sekalipun memang belum signifikan, progres ini penting bagi upaya diversifikasi investasi mineral di Indonesia guna menggeser dominasi investasi tambang Tiongkok dan memperluas ruang gerak Indonesia untuk berperan dalam rantai suplai mineral global.

## 2. Pendekatan multilateral

Selain memperluas kemitraan bilateral, Indonesia merespons sekuritisasi geoekonomi di Indo-Pasifik dengan memperluas pendekatan multilateralisme, khususnya pada forum-forum ekonomi regional dan global. Perluasan kemitraan tersebut dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk membentuk arsitektur investasi yang menguntungkan Indonesia dalam sektor padat-kapital. Di antaranya, Indonesia mendorong pembahasan isu investasi dan perdagangan multilateral dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali tahun 2022 lalu. Indonesia juga menyatakan keinginannya untuk bergabung ke dalam *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) yang menawarkan aneka keuntungan dalam pengembangan sektor mineral dan teknologi. Lebih lanjut, Jakarta juga mendorong kemajuan arsitektur geoekonomi regional seperti ASEAN dan berinteraksi dekat di dalam aneka inisiatif geoekonomi multilateral bentukan AS, seperti IPEF.

Dalam KTT G20 tahun 2022, Indonesia selaku ketua konferensi memegang peran penting dalam menjadikan isu investasi sebagai bahasan prioritas. Di antaranya, dalam Deklarasi Bersama KTT G20, Indonesia menekankan pentingnya “reformasi struktural di tingkat global” untuk mendorong kebebasan investasi dan memperkuat perdagangan multilateral (TWH, 2022). Deklarasi tersebut juga menetapkan dibentuknya *multilateral trading system* (MTS) di bawah koordinasi WTO untuk mendorong perdagangan multilateral yang lebih inklusif dan dapat mendukung peran negara-negara berkembang dalam rantai suplai global (TWH, 2022). Selama ini, investasi dan perdagangan di antara anggota G20 masih didominasi oleh negara maju atau kekuatan besar global. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia berupaya untuk memegang peran yang lebih luas dalam geoekonomi global, khususnya sektor-sektor unggulan. Dalam sektor teknologi, Indonesia memanfaatkan forum ini sebagai ajang mempromosikan kemajuan ekonomi digital.

Pada tingkat regional, Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 menjadi momen untuk integrasi ekonomi regional sekaligus momentum bagi Indonesia untuk menawarkan kawasan Asia Tenggara sebagai mitra *de-risking*. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (2023) dalam *ASEAN Economic Integration Brief*, Indonesia dalam keketuaannya mengusung tema *Epicentrum of Growth*. Di sini, Indonesia berupaya untuk mendorong ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dan inovasi ekonomi regional, yang artinya mendorong konektivitas, penguatan investasi intraregional, dan ketahanan ekonomi. Dalam KTT ASEAN Ke-42 di Labuan Bajo tahun 2023, upaya ini diwujudkan dengan deklarasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik (ASEAN, 2023a). Dalam deklarasi ini, negara anggota ASEAN sepakat untuk “meningkatkan industri kendaraan listrik di negara anggota dan menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi kendaraan listrik global”. Praktis, Indonesia jelas dilibatkan sebagai produsen mineral untuk baterai kendaraan, yang tidak hanya diproyeksikan akan meningkatkan pendapatan Indonesia, tetapi juga menjadi progres signifikan bagi

kapitalisasi *de-risking*. Hal ini mengingat kian banyak mitra regional Indonesia yang menjadi konsumen dalam pasar kendaraan listrik sehingga Indonesia dapat memperoleh keuntungan signifikan dari tren ini.

Terkini, perluasan multilateralisme juga dilakukan Indonesia dengan lebih aktif terlibat dalam forum-forum yang terasosiasi dengan negara Barat atau bentukan AS. Pertama, Indonesia telah mengajukan keanggotaan di OECD sejak Juli 2023 (Sulaiman, 2024). Pada bulan April 2024, Indonesia secara resmi bahkan telah diterima sebagai calon anggota OECD dan diperkirakan akan menjalani proses menjadi anggota penuh selama tiga hingga empat tahun. Terkait dengan keanggotaan Indonesia di OECD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan manfaat keanggotaan OECD terhadap kemajuan ekonomi Indonesia, khususnya hilirisasi mineral dalam bentuk semikonduktor (SKRI, 2024). Contohnya, Indonesia tengah mendorong kerja sama dengan Jerman untuk pengembangan SDM industri semikonduktor. Dengan menjadi anggota OECD, inisiatif serupa akan berjalan lebih ekstensif dan komprehensif sehingga membawa keuntungan lebih besar dan pasti bagi Indonesia yang tengah mengembangkan industrialisasi. Pendekatan Indonesia terhadap OECD yang semakin intensif menepis anggapan sejumlah pihak akan ketertarikan Indonesia untuk menjadi anggota BRICS—blok ekonomi pesaing OECD yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (Bonesh, 2023, October 13; Donnellon-May, 2023, February 8; Kaur & Kaur, 2015). Peralpnya, sekalipun BRICS mencitrakan diri sebagai blok ekonomi negara berkembang, jika Indonesia memilih BRICS alih-alih OECD maka Indonesia akan kian terikat dengan kemitraan ekonomi dengan Tiongkok (Ng & Santiko, 2023).

Kedua, Indonesia meningkatkan interaksi dengan IPEF. Selain meningkatkan status kemitraan dengan AS menjadi strategis-komprehensif, Indonesia berupaya menjangkau forum multilateral bentukan AS tersebut guna mendiversifikasi kemitraan dan memperkuat status Indonesia di mata negara-negara Barat sebagai

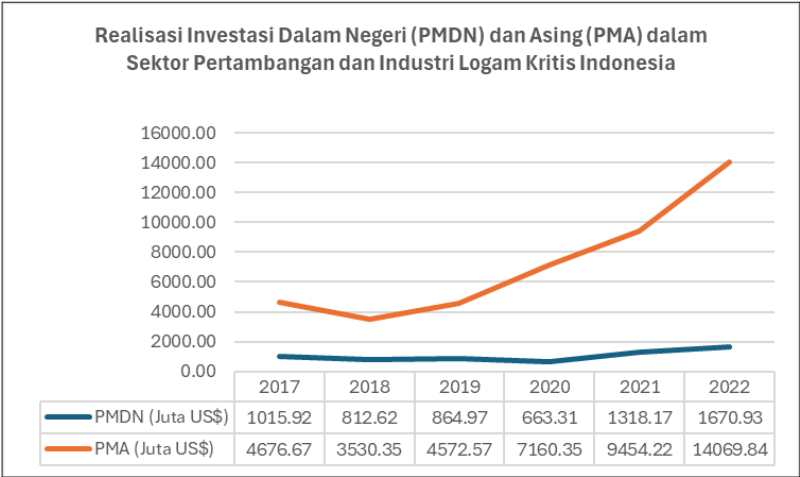
bentuk pengurangan risiko. Indonesia berharap bahwa upaya ini akan memberikan keuntungan dalam industrialisasi, khususnya dukungan AS terhadap hilirisasi mineral Indonesia, sekalipun memang IPEF sendiri belum berdampak berarti bagi perdagangan bebas. Apalagi, keterlibatan Indonesia dalam IPEF akan memperkuat kemitraan Indonesia-AS yang telah terjalin secara bilateral hingga level strategis-komprehensif, di mana Indonesia dapat memperoleh akses kredit pajak untuk hilirisasi mineral kritis (Hendrix, 2023). Di sisi lain, keterlibatan Indonesia tersebut juga akan memastikan inklusivitas IPEF, agar tetap mendukung posisi negara-negara ASEAN dan menguntungkan kawasan Asia Tenggara dalam aneka inisiatif forum tersebut dalam jangka panjang (Jakjanihan, 2023).

## E. Limitasi Indonesia dalam Kapitalisasi *De-risking*

### 1. Limitasi Domestik

Meski Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan, terdapat berbagai limitasi yang menghambat Indonesia dalam mengkapitalisasi tren *de-risking* di ranah domestik dan internasional. Isu domestik pertama yang menghambat kapitalisasi *de-risking* adalah kurang proporsionalnya pemberian akses pemerintah antara aktor lokal dan investor asing. Selain penyusunan kebijakan soal investasi asing Indonesia yang masih didominasi oleh elite pemerintah pusat, misalnya di lingkaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang menjadi tulang punggung dalam menangani investasi Tiongkok ke Indonesia (KKBKIRI, 2023; Wenbin, 2021), pemberian akses investasi dari pemerintah juga masih tersentralisasi kepada aktor lokal lainnya. Baru-baru ini, Presiden Jokowi memberikan izin kepada organisasi masyarakat (ormas) untuk melakukan pengelolaan tambang di wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) (BBC, 2024). Sekalipun izin tersebut baru diberikan pemerintah untuk penambangan batu bara dan hingga saat ini realisasi investasi asing dalam pertambangan mineral kritis masih mendominasi. Memang, sebagaimana tercatat dalam Gambar 3.1, investasi asing dalam sektor pertambangan dan

industri logam kritis masih mendominasi di Indonesia. Akan tetapi, pemberian akses yang terlalu luas kepada aktor-aktor lokal tanpa mempertimbangkan relasi dengan investor asing menjadi gestur yang dapat berdampak negatif pada reputasi Indonesia. Padahal, di tengah tren *de-risking* tersebut, seharusnya Indonesia dapat menjaring lebih banyak investor asing guna mendorong kemajuan dan daya saing investasi pada sektor ini.



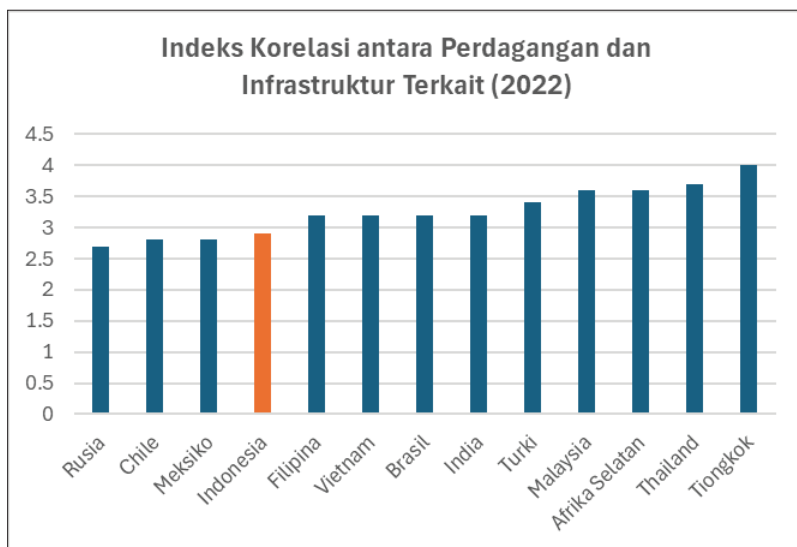
Sumber: Taufikurrahman et al. (2023, 3)

**Gambar 3.1** Realisasi Investasi Dalam Negeri (PMDN) dan Asing (PMA) dalam Sektor Pertambangan dan Industri Logam Kritis Indonesia

Apabila terus berlanjut dan meluas, pemberian izin ini akan mendorong dominasi aktor lokal dalam sektor pertambangan yang akan membuat akses masuk bagi investor asing semakin terbatas. Hal ini agaknya berkontradiksi dengan aturan dalam Undang-undang Cipta Kerja yang berorientasi liberalisasi sektor pertambangan, yang seharusnya mempermudah investasi mitra luar negeri (Pattinggi et al., 2021). Apalagi, di banyak daerah, masih kerap terjadi penguasaan usaha tambang oleh oligarki lokal, misalnya di Kalimantan Selatan, yang berkelindan dengan dinamika politik elektoral dan ketokohan

yang kian meningkatkan dominasi aktor lokal dalam investasi pertambangan (Hemanona & Suharyono, 2017). Lebih lanjut, sentimen negatif investor asing terhadap Indonesia tentunya akan menurun, membuat prospek Indonesia sebagai negara strategis dalam sektor ini akan memudar dan berujung pada ditinggalkannya Indonesia selaku mitra *de-risking*.

Selain dominasi aktor lokal, Indonesia menemui hambatan dalam infrastruktur pendukung perdagangan dan investasi. Berdasarkan analisis Bank Dunia (2022) pada Gambar 3.2, indeks kualitas infrastruktur transportasi di Indonesia hanya mencapai 2,9 dalam skala 1 hingga 5. Indeks ini bahkan lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN, semisal Vietnam (3,2) dan Thailand (3,6). Sejumlah permasalahan utama transportasi logistik di Indonesia, yakni waktu tunggu di pelabuhan (*dwelling time*) yang masih cukup panjang akibat masih belum meratanya teknologi pendukung bongkar muat logistik. Kemudian, disparitas kualitas jalan raya antara Jawa dan luar Jawa juga cukup signifikan, di mana jalan raya di Luar Jawa masih cukup banyak yang belum teraspal atau belum memiliki lebar tertentu untuk memungkinkan kendaraan logistik melewati jalan tersebut dengan lancar (Curristine et al., 2018, 81). Jika permasalahan infrastruktur ini tidak kunjung membaik, investor dari negara mitra tentu akan mempertimbangkan ulang investasi mereka di Indonesia, seiring dengan masih banyaknya negara ASEAN yang memiliki infrastruktur transportasi yang lebih baik untuk kelancaran logistik mereka.



Sumber: Bank Dunia (2022)

**Gambar 3.2** Indeks Korelasi antara Perdagangan dan Infrastruktur Terkait

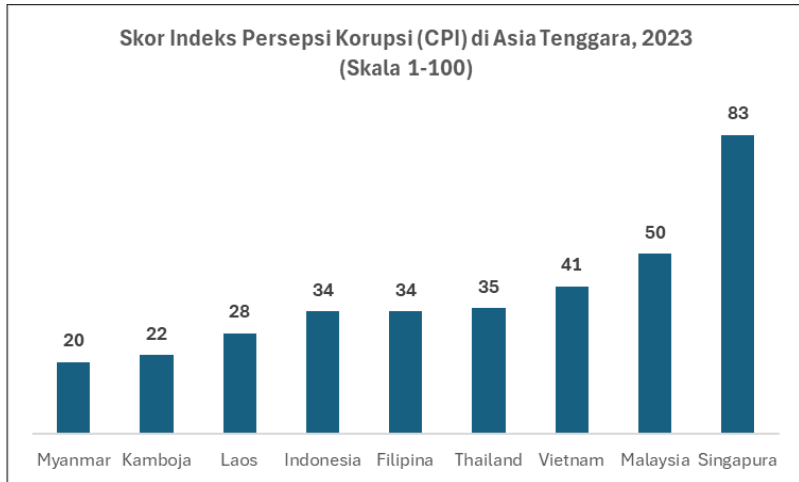
Hambatan domestik ketiga yang dihadapi Indonesia dalam kapitalisasi tren *de-risking* adalah permasalahan kebijakan dan regulasi yang berbelit dan tumpang tindih. Hingga saat ini, upaya pemerintah untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan iklim investasi, seperti UU Cipta Kerja nampaknya belum menunjukkan hasil yang memuaskan, di mana masih terjadi keluhan terkait rumitnya regulasi di Indonesia (Intan, 2020; USDS, 2023). Isu ini pula digarisbawahi oleh Kamar Dagang AS di Indonesia (AMCHAM). Dalam laporannya, banyak keluhan dari investor AS terkait dengan birokrasi yang kompleks, di mana tiap kementerian memiliki aturan yang berbeda-beda terkait perizinan investasi. Sistem *online single submission* (OSS) yang saat ini diimplementasikan berdasarkan UU Cipta Kerja belum terkoordinasi secara merata, di mana kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih mensyaratkan pengumpulan dokumen secara manual (EYI, 2022, 3). Miskoordinasi ini juga memperpanjang waktu tunggu perizinan

yang membuat realisasi investasi tidak lancar, misalnya pengurusan AMDAL memerlukan waktu tunggu hingga 150 hari (EYI, 2022, 28).

Penegakan korupsi, terutama di tingkat daerah, juga masih belum efektif, terutama setelah revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019 yang tidak hanya mengurangi independensi lembaga penegakan hukum tersebut karena semakin kuatnya pengawasan langsung dari pemerintah, tetapi juga mengurangi jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK.<sup>10</sup> Hingga saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu negara Asia Tenggara dengan indeks persepsi korupsi (*corruption perceptions index/CPI*) terendah di Kawasan (Gambar 3.3). Transparency International (2023) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-115 dari 180 negara dengan skor hanya 34 dari 100. Adapun negara lain seperti Vietnam menempati peringkat ke-83 dengan skor 41 dari 100, dan Malaysia pada peringkat ke-56 dengan skor 50 dari 100. Sejauh ini, Indonesia hanya menempati peringkat keenam di Asia Tenggara dalam hal indeks persepsi korupsi, jauh tertinggal dibandingkan Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Praktis, hal ini mendisrupsi iklim investasi di Indonesia yang memerlukan kepastian dan ketegasan hukum. Ditambah, UU Cipta Kerja yang seharusnya memperbaiki iklim investasi dengan kemudahan perizinan melalui sentralisasi perizinan justru mempersempit ruang akuntabilitas dan memperlemah aspek integritas, seiring dengan ketiadaan aturan turunan untuk memastikan transparansi izin perusahaan (TI, 2023, 9–10).

---

<sup>10</sup> Tercatat, terjadi penurunan jumlah penanganan kasus korupsi oleh KPK secara signifikan antara tahun 2019 dan 2021. Pada tahun 2019, KPK tercatat menangani 153 kasus korupsi. Pada tahun 2020 dan 2021, kasus korupsi yang ditangani KPK menurun menjadi 75 dan 88 (USDS, 2023).



Sumber: Transparency International (2023)

**Gambar 3.3** Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) di Asia Tenggara

## 2. Limitasi Internasional

Selain berbagai permasalahan dan batasan domestik, usaha Indonesia dalam konteks *de-risking* geoekonomi juga terkendala oleh kapasitas Indonesia dalam mengapitalisasi relasinya dengan berbagai negara mitra strategis. Pertama, adalah dominasi Tiongkok dalam dinamika sektor mineral kritis dan teknologi di Indonesia yang justru dipertahankan oleh sebagian kementerian dan lembaga negara. Investasi Tiongkok di Indonesia didominasi oleh raksasa pertambangan dan industri mineral, seperti Tsingshan Group yang merupakan produsen baja nirkarat terbesar di Tiongkok yang beroperasi di Indonesia dan Lygend Resources & Technology yang merupakan perusahaan nikel terbesar di Tiongkok (Thibault, 2024, 21–22; Yean & Negara, 2020, 14). Di Morowali, Sulawesi Tengah sendiri, perusahaan-perusahaan tersebut menguasai lebih dari 2.000 hektare lahan pertambangan dan mempekerjakan lebih dari 43.000 karyawan lokal dan asing (Tritto, 2023, 7–8). Adapun secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi lebih dari 40% dari bahan dasar baterai kendaraan listrik di dunia (Tritto, 2023, 8).

Dominasi tersebut dipertahankan oleh sejumlah elite politik dan pemerintahan Indonesia, di mana mereka memberikan ‘karpet merah’ untuk memberi aneka prioritas dan kemudahan perusahaan Tiongkok untuk berbisnis di Indonesia (Pramono et al., 2022; Rosada, Wibisana, & Paksi, 2023; Tritto, 2023, 11). Sebagai contoh, sejak tahun 2022, promosi kemudahan berbisnis di Indonesia hampir setiap tahun dilakukan oleh sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan tajuk Forum Kemitraan Bisnis Indonesia-Tiongkok. Selain diskusi interaktif, forum tersebut juga menjadi ajang pengenalan dan promosi sektor-sektor strategis, termasuk pertambangan mineral kritis, yang kemudian memperluas keterlibatan investor Tiongkok di Indonesia (KKBKIRI, 2023).

Di sisi lain, promosi serupa kepada negara-negara mitra yang berseberangan dengan Tiongkok, seperti AS, Jepang, Australia, dan Eropa kenyataannya masih belum begitu gencar. Sebagai contoh, sekalipun Indonesia dan Australia terus meningkatkan dialog mengenai investasi dan telah menjajaki peningkatan status relasi hingga level strategis-komprehensif, promosi investasi masih belum terlalu gencar dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait. Hingga tahun 2023, Canberra baru berinvestasi senilai US\$ 545 juta—kurang dari 10% dari investasi Tiongkok di Indonesia pada tahun yang sama (BKPM, 2023). Hal ini menunjukkan kurangnya upaya kapitalisasi kemitraan oleh Pemerintah Indonesia terhadap negara-negara selain Tiongkok yang dapat menjadi preseden negatif bagi mereka, mengingat ketergantungan yang tetap tinggi kepada Tiongkok akan dipandang sebagai ancaman keamanan.

Kedua, adalah masih minimnya kesadaran dan konsistensi Pemerintah Indonesia terhadap rezim pembangunan berkelanjutan. Sekalipun telah memiliki aturan-aturan hukum payung terkait kelestarian lingkungan, seperti yang tertuang dalam UU Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia belum secara spesifik memiliki strategi untuk mendorong pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab (*responsible business conduct*) yang berorientasi pada rezim lingkungan hidup

global, seperti Perjanjian Paris (USDS, 2021). Contoh lainnya, Pemerintah Indonesia belum menaati aturan OECD terkait perusahaan multinasional pertambangan dan rantai suplai mineral (USDS, 2023). Padahal, strategi tersebut penting untuk mendorong kepatuhan investor dan perusahaan tambang terhadap aturan terkait lingkungan. Lebih lanjut, strategi ini krusial untuk menjaga citra Indonesia di mata negara-negara Barat yang cenderung peduli terhadap pembangunan berkelanjutan sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis yang menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Ketiga, upaya Indonesia untuk melakukan kapitalisasi kemitraan dengan negara-negara alternatif juga terhambat akan ambiguitas sikap Indonesia sendiri. Dalam dekade terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia menjalin kemitraan yang relatif sama erat, baik dengan Tiongkok maupun AS. Indonesia telah meningkatkan relasi kemitraan dengan kedua negara hingga level strategis-komprehensif dan telah mencapai aneka kerja sama dalam berbagai sektor (KLNRI, 2023; TWH, 2023). Di satu sisi, sikap ini memang menguntungkan Indonesia, di mana Jakarta dapat memperoleh aneka keuntungan untuk pengembangan sektor-sektor strategis seperti teknologi dan pertambangan dari kedua negara besar tersebut. Akan tetapi, di tengah tren geoekonomi yang semakin dikotomis dan tersekritisasi, sikap ini dapat menjadi bumerang bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia akan dipandang negatif sebagai negara yang ambigu dalam konteks geoekonomi dan berisiko merugikan salah satu pihak. Alhasil, kepercayaan mitra alternatif terhadap komitmen Indonesia akan berkurang dan berisiko membuat upaya *de-risking* Indonesia menjadi bersifat sekadar simbolis (Storey, 2021).

Hal ini berbeda dengan Vietnam yang sejak awal memberikan sikap yang jelas terhadap tren geoekonomi di Indo-Pasifik. Sekalipun Vietnam bukan merupakan sekutu formal AS, negara tersebut menjalin kemitraan yang lebih kuat dengan AS seiring dengan memburuknya relasi dengan Tiongkok akibat sengketa Laut Tiongkok Selatan. Hal ini mendorong kepercayaan yang lebih tinggi dari AS dan perusahaan-perusahaan teknologinya, seperti Nvidia dan Intel,

yang berencana akan membuka pabrik di Vietnam sebagai bentuk *de-risking* AS terhadap Tiongkok (Benson & Sicilia, 2023; Nangoy & Munthe, 2023). Adapun komitmen investasi AS di Indonesia sejauh ini tidak banyak menyentuh sektor tersebut, dan lebih banyak berkuat pada pengembangan energi terbarukan di bawah lingkup *Just Energy Transition Partnership* (JETP), tanpa kesepakatan perdagangan dan investasi bilateral yang bersifat formal. Hal ini justru menunjukkan minimnya kepercayaan investor AS terhadap prospek Indonesia dalam tren *de-risking* dan dinamika geoekonomi regional.

## F. Penutup

Transformasi Asia-Pasifik menjadi Indo-Pasifik sebagai konsep geostrategis berimbas pada munculnya tatanan geoekonomi di kawasan. Dalam tatanan geoekonomi, Tiongkok dan AS saling berusaha untuk melakukan *de-risking* dalam memitigasi kerja sama dan ketergantungan ekonomi yang semakin rawan untuk dipersenjatai. Sebagai negara yang berada di posisi tengah, Indonesia seharusnya dapat memperoleh keuntungan dari tren ini Indonesia merupakan negara yang bersahabat baik dengan AS maupun Tiongkok. Selain itu, kekayaan mineral kritis Indonesia yang masif dan pasar yang besar membuat Indonesia menjadi mitra alternatif yang ideal. Indonesia telah berusaha mengapitalisasi tren *de-risking* dengan mendorong diversifikasi dan perluasan pasar dengan negara yang saling berusaha mengurangi ketergantungan pada sektor mineral dan teknologi kritis melalui kanal bilateral dan multilateral. Meski demikian, Indonesia mengalami berbagai batasan dari iklim geopolitik dan geoekonomi global, serta faktor domestik.

Menguatnya dominasi aktor lokal berisiko membuat investor asing sulit untuk melakukan eksplorasi pada sektor mineral dan teknologi. Lebih lanjut, kualitas dan kuantitas infrastruktur yang belum merata juga menjadi masalah pelik di Indonesia. Mirisnya, kualitas infrastruktur Indonesia di ASEAN pula kalah dibandingkan Thailand dan Vietnam, yang dapat membuat para investor mempertimbangkan ulang rencana proyek investasi mereka di Indonesia. Terakhir, sikap

pemerintah Indonesia yang masih kerap memprioritaskan investasi dari Tiongkok dan kurangnya ketegasan terhadap relasinya dengan AS membuat posisi Indonesia terkesan ambigu dan sulit untuk memperoleh kepercayaan yang lebih mendalam dari AS dan sekutu-sekutunya dalam tren *de-risking*.

Dengan tensi AS-Tiongkok yang semakin mengalami eskalasi di Indo-Pasifik, besar kemungkinan Indonesia akan tetap menghadapi tren *de-risking* dalam beberapa waktu ke depan. Keputusan Presiden AS Biden dan bakal calon presiden Donald Trump untuk saling adu kuat dalam meningkatkan jumlah tarif ke produk Tiongkok menjelang pemilu AS tahun 2024 menandakan bahwa tren yang sama masih bertahan: ekonomi dibingkai melalui kacamata keamanan dan keterbukaan pasar dianggap sebagai kerentanan. Dalam upaya mengapitalisasi tren ini, diplomasi ekonomi Indonesia yang lebih proaktif dalam mencari celah-celah pasar tidaklah cukup. Indonesia perlu juga melakukan transformasi di tatanan domestik melalui perbaikan institusi, regulasi, dan infrastruktur yang dapat membuat Indonesia menjadi mitra yang dilirik di tengah tren pengurangan risiko. Tanpanya, besar kemungkinan tatanan geoekonomi yang ada hanya semakin menyingkirkan Indonesia dari kancah ekonomi dan keamanan kawasan, termasuk negara tetangga di ASEAN yang memiliki performa lebih baik dari Indonesia.

## Referensi

- Acharya, A. (2024, June 13). Turning the idea of the Indo-Pacific into reality. *East Asia Forum*. Retrieved from <https://eastasiaforum.org/2024/06/13/turning-the-idea-of-the-indo-pacific-into-reality/>
- Anas, T., Hill, H., Narjoko, D., & Putra, C. T. (2022). The Indonesian economy in turbulent times. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(3), 241–271. doi:10.1080/00074918.2022.2133344
- Anwar, D. F. (2019). Indonesia-China relations: To be handled with care. *ISEAS Perspective*, (19).

- Anwar, D. F. (2023). Indonesia's hedging plus policy in the face of China's rise and the US-China rivalry in the Indo-Pacific region. *The Pacific Review*, 36(2), 351–377. doi:10.1080/09512748.2022.2160794
- Ardhani, I., Nandyatama, R. W., & Alvian, R. A. (2023). Middle power legitimization strategies: the case of Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. *Australian Journal of International Affairs*, 77(4), 359–379. doi:10.1080/10357718.2023.2228709
- ASEAN. (2023a). ASEAN Leaders' declaration on developing regional electric vehicle ecosystem [Press release]. Retrieved from [https://asean.org/wp-content/uploads/2023/05/07-ASEAN-Leaders-Declaration-on-Developing-Regional-EV-Ecosystem\\_adopted.pdf](https://asean.org/wp-content/uploads/2023/05/07-ASEAN-Leaders-Declaration-on-Developing-Regional-EV-Ecosystem_adopted.pdf)
- ASEAN. (2023b). *ASEAN statistical yearbook 2023*. ASEAN Secretariat.
- Babić, M., & Dixon, A. D. (2022). Is the China effect real? Ideational change and the political contestation of chinese state-led investment in Europe. *The Chinese Journal of International Politics*, 15(2), 111–139. doi:10.1093/cjip/poac009
- BAPPENAS. (2023). Rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025–2045 [Press release]. Retrieved from <https://www.bappenas.go.id/berita/rancangan-akhir-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-2025-2045-YohFL>
- BBC. (2024, June 1). Presiden Jokowi izinkan ormas keagamaan kelola tambang - Rawan 'konflik SARA' dan 'alat perusahaan', kata pegiat lingkungan. *BBC News Indonesia*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1ddgk11v0yo>
- Becker, A. S. (1987). Main Features of United States-Soviet Trade. *Proceedings of the Academy of Political Science*, 36(4), 67–77. doi:10.2307/1173834
- Benson, E., & Sicilia, G. (2023, December 20). A closer look at de-risking. Retrieved from <https://www.csis.org/analysis/closer-look-de-risking>
- Betts, R. K. (1993). Wealth, power, and instability: East Asia and the United States after the Cold War. *International Security*, 18(3), 34–77.
- BKPM. (2023). Realisasi investasi triwulan II dan Januari-Juni 2023 [Press release]. Retrieved from <https://www.bkpm.go.id/storage/file/pdf/1690200386.pdf>
- Blackwill, R. D. (2024, August 1). The rise and fall of the economic pivot to Asia. *Foreign Policy*. Retrieved from <https://foreignpolicy.com/2024/08/01/lost-decade-us-economic-pivot-to-asia-defense/>

- Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). *War by Other Means. Geoeconomics and Statecraft*. Harvard University Press.
- Bonesh, F. R. (2023, October 13). Indonesia's approach to BRICS: Opportunities and membership potential. *ASEAN Briefing*. Retrieved from <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-approach-to-brics-opportunities-and-membership-potential/>
- Cave, D. (2023, May 22). How 'decoupling' from China became 'de-risking'. *The New York Times*. Retrieved from <https://www.nytimes.com/2023/05/20/world/decoupling-china-de-risking.html>
- Chubb, A. (2023). The securitization of 'Chinese influence' in Australia. *Journal of Contemporary China*, 32(139), 17–34. doi:10.1080/10670564.2022.2052437
- Curristine, T. R., Nozaki, M., & Shin, J. (2018). Chapter 4: Developing infrastructure. In L. E. Breuer, J. Guajardo, & T. Kinda (Eds.), *Realizing Indonesia's Economic Potential* (67–84). International Monetary Fund (IMF).
- Damuri, Y. R., Atje, R., Alexandra, L. A., & Soedjito, A. (2014). *Maritime silk road and Indonesia's perspective of maritime state*. Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- DFAT. (2020). Plan of action for the Indonesia-Australia comprehensive strategic partnership (2020–2024) [Press release]. Retrieved from <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/plan-of-action-for-the-indonesia-australia-comprehensive-strategic-partnership-2020-2024.pdf>
- DFAT. (2021, September 9). Joint statement on the seventh Indonesia-Australia foreign and defence ministers 2+2 meeting [Press release]. Retrieved from <https://www.dfat.gov.au/news/media-release/joint-statement-seventh-indonesia-australia-foreign-and-defence-ministers-22-meeting>
- DIS. (2023, November 24). Indonesia and Australia cooperation on electric vehicles [Press release]. Retrieved from <https://www.minister.industry.gov.au/ministers/husic/media-releases/indonesia-and-australia-cooperation-electric-vehicles>

- Donnellon-May, G. (2023, February 8). BRICS expanding to Saudi Arabia, Indonesia and beyond holds promise, but challenges remain. *South China Morning Post*. Retrieved from <https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3209345/brics-expanding-saudi-arabia-indonesia-and-beyond-holds-promise-challenges-remain>
- Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B., Strange, A., & Tierney, M. J. (2022). *Banking on Beijing: The aims and impacts of China's overseas development program*. Cambridge University Press.
- EYI. (2022). *US-Indonesia Investment Report 2022. Resilient Indonesia*. Retrieved from [https://www.amcham.or.id/viewer/web/viewer.html?file=https://www.amcham.or.id/document/material/US\\_Indonesia\\_Investment\\_Report\\_2022\\_63904f3e09e5e.pdf](https://www.amcham.or.id/viewer/web/viewer.html?file=https://www.amcham.or.id/document/material/US_Indonesia_Investment_Report_2022_63904f3e09e5e.pdf)
- Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. *International Security*, 44(1), 42-79. doi:[https://doi.org/10.1162/isec\\_a\\_00351](https://doi.org/10.1162/isec_a_00351)
- Garlick, J. (2023). *Advantage China: agent of change in an era of global disruption*. Bloomsbury Publishing.
- Gertz, G., & Evers, M. M. (2020). Geoeconomic competition: Will state capitalism win? *The Washington Quarterly*, 43(2), 117-136. doi:10.1080/0163660X.2020.1770962
- Ghifari, D. (2023, September 8). Indonesia invites US to work on critical minerals agreement. *The Jakarta Post*. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/business/2023/09/08/jokowi-urges-us-to-start-discussion-on-critical-mineral-agreement.html>
- Ghiretti, F. (2023, June). *How China Imposes Sanctions. A guide to the evolution of Beijing's New Policy Tool*. Retrieved from <https://merics.org/sites/default/files/2023-06/MERICS%20Report%20How%20China%20imposes%20sanctions.pdf>
- Goh, E. (2007). Great powers and hierarchical order in Southeast Asia: Analyzing regional security strategies. *International Security*, 32(3), 113-157. doi:10.1162/isec.2008.32.3.113
- GTA. (2024, August 24). United States of America. Retrieved from [https://www.globaltradealert.org/country/222/period-from\\_20090101/period-to\\_20240920](https://www.globaltradealert.org/country/222/period-from_20090101/period-to_20240920)
- Hartarto, A. (2023). ASEAN as Epicentrum of growth: Propelling Southeast Asia as an economic powerhouse. *ASEAN Economic Integration Brief*, (13), 5-6.

- Heiduk, F., & Wacker, G. (2020). From Asia-Pacific to Indo-Pacific: Significance, implementation and challenges. *SWP Research Paper*, (9), 1–43. doi:<https://doi.org/10.18449/2020RP09>
- Hemanona, V., & Suharyono, S. (2017). Analisis pengaruh foreign direct investment terhadap country advantages Indonesia (Studi terhadap FDI Amerika Serikat di Indonesia). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 52(1), 16–25.
- Hendrix, C. (2023, November 20). Rethinking Indonesia's nickel policies to power economic growth. *East Asia Forum*. Retrieved from <https://eastasiaforum.org/2023/11/20/rethinking-indonesias-nickel-policies-to-power-economic-growth/>
- Hunt, P.-A., Biesheuvel, T., & Burton, M. (2024, July 11). BHP to shut Australia nickel business as glut upends market. *BNN Bloomberg*. Retrieved from <https://www.bnnbloomberg.ca/business/international/2024/07/11/bhp-to-halt-australia-nickel-project-as-glut-upends-industry/>
- IEA. (2023). *Energy Technology Perspectives 2023*. International Energy Agency (IEA).
- Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurrohman, A. (2024). Indonesia's fiscal policy in the aftermath of the pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 1–33. doi:10.1080/00074918.2024.2335967
- Intan, N. (2020, August 6). Regulasi berbelit, alasan investor AS susah masuk Indonesia. *Republika*. Retrieved from <https://ekonomi.republika.co.id/berita/qemr3x383/regulasi-berbelit-alasan-investor-as-susah-masuk-indonesia>
- Jakjanihan, A. (2023, December). Keeping the IPEF afloat is in Indonesia's interest. *East Asia Forum*. Retrieved from <https://eastasiaforum.org/2023/12/09/keeping-the-ipef-afloat-is-in-indonesias-interest/>
- Jennings, R. (2024, May 18). China's high-speed railway in Indonesia is adding trips – but debt could hold back the gravy train. *South China Morning Post*. Retrieved from <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3263108/chinas-high-speed-railway-indonesia-adding-trips-debt-could-hold-back-gravy-train>
- Jiang, Y. (2023, August). *PRC's approach to Indonesia: Competing for regional influence*. Retrieved from <https://chinamatters.org.au/wp-content/uploads/2023/08/PRCs-approach-to-Indonesia-Yun-Jiang-August-2023.pdf>

- Kang, D. C. (2003). Getting Asia wrong: The need for new analytical frameworks. *International Security*, 27(4), 57–85.
- Kang, D. C. (2022). Still getting Asia wrong: No “Contain China” coalition exists. *The Washington Quarterly*, 45(4), 79–98. doi:10.1080/0163660X.2022.2148918
- Karim, M. F. (2018). Middle power, status-seeking and role conceptions: the cases of Indonesia and South Korea. *Australian Journal of International Affairs*, 72(4), 343–363. doi:10.1080/10357718.2018.1443428
- Kaur, P., & Kaur, K. (2015). New Allies for BRICS - Egypt or Indonesia. *Abhigyan*, 33(3), 16–27. doi:10.1177/0970238520150302
- KKBKIRI. (2023, February 21). Indonesia perkuat kerja sama dengan Tiongkok melalui forum kemitraan bisnis ketiga [Press release]. Retrieved from <https://maritim.go.id/detail/indonesia-perkuat-kerja-sama-dengan-tiongkok-melalui-forum-kemitraan-bisnis-ketiga>
- KLNRI. (2022, July 7). Pertemuan bilateral Menlu RI - Menlu RRT [Press release]. Retrieved from <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3781/view/pertemuan-bilateral-menlu-ri-menlu-rrt>
- KLNRI. (2023, October 18). Joint statement on deepening comprehensive strategic cooperation between the people’s Republic of China and the Republic of Indonesia, 18 October 2023, Beijing [Press release]. Retrieved from [https://kemlu.go.id/portal/en/read/5393/siaran\\_pers/joint-statement-on-deepening-comprehensive-strategic-cooperation-between-the-peoples-republic-of-china-and-the-republic-of-indonesia-18-october-2023-beijing](https://kemlu.go.id/portal/en/read/5393/siaran_pers/joint-statement-on-deepening-comprehensive-strategic-cooperation-between-the-peoples-republic-of-china-and-the-republic-of-indonesia-18-october-2023-beijing)
- KPRI. (2024, August 4). Neraca perdagangan dengan mitra dagang [Press release]. Retrieved from <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/neraca-perdagangan-dengan-mitra-dagang>
- Kuik, C.-C. (2023). Shades of grey: riskification and hedging in the Indo-Pacific. *The Pacific Review*, 36(6), 1181–1214. doi:10.1080/09512748.2022.2110608
- Lee, L. Y., & Kaufman, N. (2023, November 13). Q&A | Solar tariffs and the US Energy Transition. Retrieved from <https://www.energypolicy.columbia.edu/qa-solar-tariffs-and-the-us-energy-transition/#>
- Li, M. (2020). The Belt and Road Initiative: geo-economics and Indo-Pacific security competition. *International Affairs*, 96(1), 169–187. doi:10.1093/ia/iiz240

- Lim, D. (2023, July 13). Economic security and hedging in Southeast Asia. *East Asia Forum*. Retrieved from <https://eastasiaforum.org/2023/07/12/economic-security-and-hedging-in-southeast-asia/>
- Lim, D. J., & Cooper, Z. (2015). Reassessing hedging: The Logic of alignment in East Asia. *Security Studies*, 24(4), 696–727. doi:10.1080/09636412.2015.1103130
- Luttwak, E. N. (1990). From geopolitics to geo-economics: Logic of conflict, grammar of commerce. *The National Interest*, (20), 17–23.
- Mearsheimer, J. (2005, November 8). The rise of China will not be peaceful at all. *The Australian*. Retrieved from <https://www.mearsheimer.com/wp-content/uploads/2019/06/The-Australian-November-18-2005.pdf>
- Medcalf, R. (2020). *Indo-pacific empire: China, America and the contest for the world's pivotal region*. Manchester University Press.
- Menon, J. (2024, March 23). The export-led model is evolving, not dying. *East Asia Forum*. Retrieved from <https://eastasiaforum.org/2024/03/23/the-export-led-model-is-evolving-not-dying/>
- Nangoy, F. (2024, July 16). US approaches Indonesia for multinational critical mineral partnership. *Reuters*. Retrieved from <https://www.reuters.com/markets/commodities/us-approaches-indonesia-multinational-critical-mineral-partnership-2024-07-15/>
- Nangoy, F., & Munthe, B. C. (2023, February 6). Investments in Indonesia's nickel industry. *Reuters*. Retrieved from <https://www.reuters.com/markets/commodities/investments-indonesias-nickel-industry-2023-02-06/>
- Ng, J., & Santiko, U. (2023). Is Indonesia about to join BRICS? *IDSS Paper*, (057), 1–4.
- NI. (2024). Nickel operations in Indonesia. Retrieved from <https://nickelindustries.com/operations/>
- Nikoladze, M., Meng, P., & Yin, J. (2023, June 14). How is China mitigating the effects of sanctions on Russia? Retrieved from <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/how-is-china-mitigating-the-effects-of-sanctions-on-russia/>
- OUSTR. (2024). The People's Republic of China [Press release]. Retrieved from <https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china>

- Pattinggi, D. M. M., Goerke, M., Dawborn, D., Gadd, A., & Handoyo, A. S. T. (2021, March 3). Indonesia's new investment list: Liberalisation of foreign investment in the energy, resources and infrastructure sectors. Retrieved from <https://www.herbertysmithfreehills.com/notes/indonesia/2021-03/indonesias-new-investment-list-liberalisation-of-foreign-investment-in-the-energy-resources-and-infrastructure-sectors>
- Patunru, A. A. (2023). Trade policy in Indonesia: Between ambivalence, pragmatism and nationalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(3), 311–340. doi:10.1080/00074918.2023.2282821
- Pramono, A. H., Manessa, M. D. M., Indrawan, M., Sari, D. A., Fuad, H. A. H., Khasanah, N., Pratiwi, K., Siregar, R. S. E., Winarni, N. L., Supriatna, J., Haryanto, B., Gallagher, K. P., Ray, R., Simmons, B. A., & Yogaswara, H. (2022). China's belt and road initiative in Indonesia: Mapping and mitigating environmental and social risks. *Global China Initiative (GCI) Working Paper*, (021), 1–24.
- Prasetyo, K. C. (2023). Global south responses to China's BRI projects: A case study of Jakarta-Bandung high-speed railway project. *Global South Review*, 5(2), 7–26. doi:<https://doi.org/10.22146/globalsouth.90951>
- Priamarizki, A. (2024). Understanding the domestic determinants of Indonesia's hedging policy towards the United States and China. *Contemporary Southeast Asia*, 46(1), 19–42.
- Raharjo, S. N. I., Setiawan, B., Ekawati, E., & Ghafur, M. F. (2023). Managing social resilience on outmost small islands through cross-border cooperation: A study of the marore island, Indonesia. *Jurnal Archipelago*, 2(2), 171–180.
- Reinsch, W. A. (2023, January 3). The end of neoliberalism? Retrieved from <https://www.csis.org/analysis/end-neoliberalism>
- Reynolds, M., & Goodman, M. P. (2023, March 21). Deny, deflect, deter: Countering China's economic coercion. Retrieved from <https://www.csis.org/analysis/deny-deflect-deter-countering-chinas-economic-coercion>
- Roberts, A., Moraes, H. C., & Ferguson, V. (2019). Toward a geoeconomic order in international trade and investment. *Journal of International Economic Law*, 22(4), 655–676.

- Rosada, F., Wibisana, R. A. A., & Paksi, A. K. (2023). The impact of Indonesia-China nickel cooperations on Indonesia's economy and environment. *Nation State: Journal of International Studies*, 6(2), 96–116. doi:<https://doi.org/10.24076/nsjis.v6i2.1270>
- Schoenbaum, T. J. (2023). The Biden administration's trade policy: Promise and reality. *German Law Journal*, 24(1), 102–124. doi:10.1017/glj.2023.7
- Seow, B. (2023, November 17). Asia trade talk stumble is another setback for US: Analysts. *The Jakarta Post*. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/business/2023/11/17/asia-trade-talk-stumble-is-another-setback-for-us-analysts.html>
- Sinclair, L. (2024, February 28). Nickel and lithium: Cooperation or competition with Indonesia? Retrieved from <https://www.sydney.edu.au/sydney-southeast-asia-centre/news/2024/02/28/nickel-and-lithium-cooperation-or-competition-with-indonesia.html>
- SKRI. (2019, June 12). Terima pengurus KADIN dan HIPMI, Presiden Jokowi ajak memanfaatkan peluang dari perang dagang [Press release]. Retrieved from <https://setkab.go.id/terima-pengurus-kadin-dan-hipmi-presiden-jokowi-ajak-manfaatkan-peluang-dari-perang-dagang/>
- SKRI. (2024, May 16). Indonesia seeks to become OECD member state by 2027 [Press release]. Retrieved from <https://setkab.go.id/en/indonesia-seeks-to-become-oecd-member-state-by-2027/>
- Storey, H. (2021, November 9). Do comprehensive strategic partnerships matter? *The Interpreter*. Retrieved from <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/do-comprehensive-strategic-partnerships-matter>
- Subianto, P. (2024, June 12). The road ahead for Indonesia—One of the fastest growing economies in Asia | Opinion. *Newsweek*. Retrieved from <https://www.newsweek.com/road-ahead-indonesiaone-fastest-growing-economies-asia-opinion-1911354>
- Sulaiman, S. (2024, February 29). Indonesia aims to become OECD member in 2 to 3 years, senior minister says. *Reuters*. Retrieved from <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-aims-become-oecd-member-2-3-years-senior-minister-says-2024-02-29/>
- Taplin, N. (2024, June 4). Why China's overcapacity problem is about to get even worse, in seven charts. *The Wall Street Journal*. Retrieved from <https://www.wsj.com/world/asia/why-chinas-overcapacity-problem-is-about-to-get-even-worse-in-seven-charts-d0e25e38>

- Taufikurahman, M. R., Firdaus, A. H., Ahmad, T., Febriani, D. A., & Permana, A. S. (2023). The impact of mining sector investment on national and regional economic performance. *INDEF Policy Brief*, (07), 1–9.
- Taylor, B. (2018). *The four flashpoints: How Asia goes to war*. La Trobe University Press.
- Thibault, M. (2024). The prospects of Indonesia's nickel boom amidst a systemic challenge from coal. *IFRI Papers*, 1–42.
- Thompson, B. (2024, January 30). Indonesian nickel miner boosts returns as mines fight to survive. *Financian Review*. Retrieved from <https://www.afr.com/companies/mining/indo-nickel-miner-boosts-dividend-as-aussie-rivals-fight-to-survive-20240130-p5f119>
- TI. (2023). Corruption Perceptions Index 2023. Retrieved from <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Tritto, A. (2023). *How Indonesia used chinese industrial investments to turn nickel into the new gold*. Retrieved from Washington DC, USA: [https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/files/files\\_\\_Tritto\\_Indonesia\\_Nickel.pdf](https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/files/files__Tritto_Indonesia_Nickel.pdf)
- TWH. (2017, December 18). Remarks by President Trump on the administration's national security strategy [Press release]. Retrieved from <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-administrations-national-security-strategy/>
- TWH. (2022, August 9). Fact sheet: Chips and science act will lower costs, create jobs, strengthen supply chains, and counter China [Press release]. Retrieved from <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/>
- TWH. (2022, November 16). G20 Bali leaders' declaration [Press release]. Retrieved from <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/16/g20-bali-leaders-declaration/>
- TWH. (2022, October 12). National security strategy [Press release]. Retrieved from <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf>

- TWH. (2023, April 27). Remarks by national security advisor jake sullivan on renewing American economic leadership at the brookings institution [Press release]. Retrieved from <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/04/27/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-renewing-american-economic-leadership-at-the-brookings-institution/>
- TWH. (2023, May 20). G7 Hiroshima leaders' communiqué [Press release]. Retrieved from <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/05/20/g7-hiroshima-leaders-communique/>
- TWH. (2023, November 13). Joint Statement from the Leaders of the United States and the Republic of Indonesia: Elevating relations to a comprehensive strategic partnership [Press release]. Retrieved from <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/11/13/joint-statement-from-the-leaders-of-the-united-states-and-the-republic-of-indonesia-elevating-relations-to-a-comprehensive-strategic-partnership/>
- Umar, A. R. M. (2023). The rise of the Asian middle powers: Indonesia's conceptions of international order. *International Affairs*, 99(4), 1459–1476. doi:10.1093/ia/iiaad167
- UNESCAP. (2022). *Trade agreements in Asia and the Pacific: Bigger, deeper, digital and more supportive of sustainable development?* Bangkok, Thailand: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).
- USDS. (2021). 2021 Investment climate statements: Indonesia [Press release]. Retrieved from <https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/indonesia/>
- USDS. (2023). 2023 Investment climate statements: Indonesia [Press release]. Retrieved from <https://www.state.gov/reports/2023-investment-climate-statements/indonesia/>
- von der Leyen, U. (2023, March 30). Speech by President von der Leyen on EU-China relations to the mercator institute for China studies and the European policy centre [Press release]. Retrieved from [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech\\_23\\_2063](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_2063)
- WB. (2022). Logistics performance index: Quality of trade and transport related infrastructure [Press release]. Retrieved from <https://data.worldbank.org/indicator/LP.LPI.INFR.XQ?locations=XD>

- Wenbin, Y. (2021, June 6). China, Indonesia hold inaugural meeting on high-level dialogue cooperation mechanism. *Xinhua Net*. Retrieved from [http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/06/c\\_139991980.htm](http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/06/c_139991980.htm)
- Wesley, M. (2016). *Australia and the rise of geoeconomics*. Strategic and Defence Studies Center, College of Asia and the Pacific, Australian National University (ANU).
- Wester, S. (2023, November 8). *Balancing act: Assessing China's growing economic influence in ASEAN*. Retrieved from <https://asiasociety.org/policy-institute/balancing-act-assessing-chinas-growing-economic-influence-asean>
- Wihardja, M. M. (2024, June 3). The impacts of the US tariff hikes on Southeast Asian Economies. *Fulcrum*. Retrieved from <https://fulcrum.sg/the-impacts-of-the-us-tariff-hikes-on-southeast-asian-economies/>
- Wijaya, T., & Jayasuriya, K. (2024). Militarised neoliberalism and the reconstruction of the global political economy. *New Political Economy*, 29(4), 546–559. doi:10.1080/13563467.2023.2298199
- Wilkins, T. S. (2012). 'Alignment', not 'alliance' – the shifting paradigm of international security cooperation: Toward a conceptual taxonomy of alignment. *Review of International Studies*, 38(1), 53–76. doi:10.1017/S0260210511000209
- Wilson, J. D. (2012). Resource security: a new motivation for free trade agreements in the Asia-Pacific region. *The Pacific Review*, 25(4), 429–453. doi:10.1080/09512748.2012.685098
- Yean, T. S., & Negara, S. D. (2020). Chinese investments in industrial parks: Indonesia and Malaysia compared. *ISEAS Economics Working Paper*, (08), 1–39.
- Yuniar, R. W. (2024, August 2). Is Indonesia limiting Chinese nickel investments to gain US trade benefits. *South China Morning Post*. Retrieved from <https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3272838/indonesia-limiting-chinese-nickel-investments-gain-us-trade-benefits>
- Zhang, M. Y. (2023, December 2). Australia, Indonesia aim to challenge China's Dominance in EVs and batteries. *The Diplomat*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2023/12/australia-indonesia-aim-to-challenge-chinas-dominance-in-evs-and-batteries/>